



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Jl. Soekarno Hatta No.714, Babakan Penghulu, Cinambo

Kota Bandung, Jawa Barat, [www.pta-bandung.go.id](http://www.pta-bandung.go.id), [surat@ptabandung.go.id](mailto:surat@ptabandung.go.id)

Nomor : 3871 A /WKPTA.W10-A /OT1.2/XII/2023 Bandung, 27 Desember 2023  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan  
Kegiatan Tahun 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Se-wilayah PTA Bandung

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4108/SEK/OT1.6/12/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, diminta kepada seluruh satuan kerja agar segera menyusun **Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, disusun sesuai dengan outline sebagaimana terlampir;
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 diterima di Pengadilan Tinggi Agama Bandung paling lambat tanggal **31 Januari 2024** dalam bentuk softcopy melalui link <https://bit.ly/LPK2023-PTABdg>.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Wakil Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung,

  
H. Sahrudin

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA-RI

Lampiran Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
 Nomor : 3871 A /WKPTA.W10-A /OT1.2/XII/2023  
 Tanggal : 27 Desember 2023

<b>OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN</b>	
Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I	PENDAHULUAN
Bab II	A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA .....
	B. PENYELESAIAN PERKARA
	- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
	- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu
	- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK
	- Jumlah perkara perdata yang berhasil melalui Mediasi
	- Jumlah Perkara Anak yang Berhadil melalui Diversi
	C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
	- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)
	- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
	- Perkara prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)
Bab III	SUMBER DAYA MANUSIA
	A. Mutasi
	B. Promosi
	C. Pensiun
	D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)
Bab IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI
	A. Pengelolaan Keuangan
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi
Bab V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
	A. Pembagunan Zona Integritas
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	C. Inovasi Pelayanan Publik
Bab VI	Pengawasan
	A. Internal
	B. Evaluasi
Bab VII	Penutup
	A. Kesimpulan
	B. Rekomendasi
Lampiran	